

**PENDEKATAN MANAJEMEN SEKOLAH DAN PENGAWASAN: KAJIAN  
PENYALURAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

***SCHOOL MANAGEMENT AND SUPERVISION APPROACHES: A STUDY OF THE  
DISTRIBUTION OF SCHOOL OPERATIONAL COST FUNDS (BOS) AT THE JUNIOR  
HIGH SCHOOL LEVEL***

<sup>1</sup>✉ **Makruf**

Program Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar  
[makruffendy10@gmail.com](mailto:makruffendy10@gmail.com)

<sup>2</sup>**A. Nur Insan**

Program Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar  
[12andiinsan@gmail.com](mailto:12andiinsan@gmail.com)

<sup>3</sup>**Ilham Safar**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar  
[ilhamsafar@unifa.ac.id](mailto:ilhamsafar@unifa.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen sekolah dan pengawasan terhadap penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari manajemen sekolah sebagai variabel independen pertama, pengawasan sebagai variabel independen kedua, dan penyaluran Dana BOS sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, dan komite sekolah pada SMP swasta di Kecamatan Tanjung Selor dengan jumlah responden sebanyak 31 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel proporsional. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Analisis data menggunakan bantuan software SPSS meliputi uji validitas, uji reliabilitas, regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Pengawasan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Secara simultan, manajemen sekolah dan pengawasan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran Dana BOS lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, sistem birokrasi, dan mekanisme distribusi dana dibandingkan faktor internal sekolah.

**Kata Kunci:** Manajemen Sekolah, Pengawasan, Penyaluran Dana BOS, Efektivitas, Sekolah Menengah Pertama.

**Abstract**

*This study aims to analyze the influence of school management and supervision on the distribution of School Operational Assistance Funds (BOS) at Junior High Schools in Tanjung Selor District, Bulungan Regency. The variables used in this study consist of school management as the first independent variable, supervision as the second independent variable, and BOS fund distribution as the dependent variable. This study employed a quantitative approach using a survey method. The research population consisted of principals, BOS treasurers, and school committee members at private junior high schools in Tanjung Selor District, with a total of 31 respondents. The sampling technique used proportional sampling. Data collection was conducted through questionnaires using a Likert scale. Data analysis was performed using SPSS software, including validity test, reliability test, multiple linear regression analysis, partial test (t-test), simultaneous test (F-test), and coefficient of determination ( $R^2$ ). The results showed that school management did not have a significant effect on the distribution of BOS funds. Supervision also did not*

---

*have a significant effect on the distribution of BOS funds. Simultaneously, school management and supervision did not significantly influence the distribution of BOS funds. The findings indicate that the effectiveness of BOS fund distribution is more influenced by external factors such as government policies, bureaucratic systems, and fund distribution mechanisms rather than internal school factors.*

**Keywords:** *School Management, Supervision, BOS Fund Distribution, Effectiveness, Junior High School.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, secara makro maupun mikro, dikenal kategori biaya pendidikan (Supriyadi, 2010). Pertama biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Kedua biaya pribadi (*private cost*) biaya pribadi adalah pengeluaran yang berasal dari dana pribadi (keluarga) untuk membiayai pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Selain dua hal diatas dikenal juga anggaran belanja pendidikan (*educational budget*) yang terdistribusikan dua komponen, yaitu sumber dana (pendapatan), pemasukan atau penerimaan, yang kedua pengeluaran atau belanja. Dalam implementasinya belanja di sekolah dasar di kelompokkan menjadi tiga komponen antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sumber dana di sekolah hendaknya dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya (Fauzi, 2020)

Pembiayaan pendidikan tertera dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 pasal (1) tentang pengelolaan keuangan negara dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 12, Ayat (1) (Julianda, Siagian, & Yolandari, 2025). Reformasi pendidikan mengacu pada 8 standar mutu pendidikan, yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses (pembelajaran), (4) standar penilaian, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana-prasarana, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar pengelolaan (Hidayat, Alam, Halim, & Agustian, 2023)

Bagi sekolah negeri di Indonesia sumber dana sekolah terbagi menjadi dua, yaitu: (a) dari pemerintah yang terdiri atas dana rutin, yaitu gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas; dan (b) dana dari masyarakat yang berasal dari orang tua siswa maupun sumbangan dari masyarakat luas/dunia usaha. Penyelenggaraan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek yang menunjang keberhasilan tujuan pendidikan, yakni pengelolaan sumber-sumber daya yang ada baik di dalam maupun di luar lembaga. Salah satu aspek tersebut, berkenaan dengan pembiayaan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan (Syaharuddin & Ibrahim, 2017)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. BOS merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi

seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan (Julianda et al., 2025)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dalam buku panduan BOS (2025) disebutkan bahwa penggunaan dana BOS dialokasikan pada beberapa jenis kegiatan yaitu: penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, pembayaran honor (Handayani, 2025)

Secara umum, jumlah fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs di Tanjung Selor tergolong memadai sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Bulungan, dengan data yang menunjukkan keberadaan sekitar 17 SMP di wilayah kecamatan tersebut dengan rincian SMP Negeri sebanyak 9 sekolah dan SMP Swasta sebanyak 8 sekolah.

Tabel 1. Sebaran sekolah Negeri jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor

No	Nama Sekolah	NPSN	Status	Desa/Kelurahan
1	SMP Negeri 01 Satu Atap Tanjung Selor	69786557	Negeri	Gunung Seriang
2	SMP Negeri 1 Tanjung Selor	30402559	Negeri	Tanjung Selor Hilir
3	SMP Negeri 2 Tanjung Selor	30402566	Negeri	Tanjung Selor Hilir
4	SMP Negeri 3 Tanjung Selor	30402570	Negeri	Jelarai Selor
5	SMP Negeri 5 Tanjung Selor	30402571	Negeri	Gunung Sari
6	SMP Negeri 6 Tanjung Selor	30402572	Negeri	Tanjung Selor Timur
7	SMP Negeri 7 Tanjung Selor	30402573	Negeri	Tanjung Selor Hilir
8	SMP Negeri 8 Tanjung Selor	69984098	Negeri	Apung
9	SMP Negeri Satu Atap 002 Tanjung Selor	69786558	Negeri	Tanjung Selor Hilir

Sumber Data: Dapodik 2025

Sekolah-sekolah negeri ini umumnya memiliki kapasitas siswa yang besar dan menjadi penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang signifikan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Selain sekolah negeri, terdapat juga Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMP Swasta yang menawarkan alternatif pendidikan dengan kekhasan tertentu, seringkali berbasis keagamaan atau yayasan. Keberadaan sekolah swasta ini turut berperan penting dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah pertama di Bulungan.

Tabel 2. Sebaran sekolah Swasta jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor

No	Nama Sekolah	NPSN	Status	Desa/Kelurahan
1	SMPS Integral Hidayatullah Al Qalam Tanjung Selor	30407737	Swasta	Jelarai Selor
2	SMP Agape Tanjung Selor	30402540	Swasta	Tanjung Selor Hilir
3	SMP AL Khairaat Tanjung Selor	30402541	Swasta	Tanjung Selor Timur
4	SMP Darul Azka Tanjung Selor	70010096	Swasta	Tanjung Selor Hilir
5	SMP Idrisiyyah Tanjung Selor	69959227	Swasta	Gunung Sari

6	SMP Islam Plus Yardhana Tanjung Selor	69906853	Swasta	Tanjung Selor Hilir
7	SMP Islam Terpadu (SMPIT) Bina Benuanta Tanjung Selor	70002637	Swasta	Tanjung Selor Hilir
8	SMP Muhammadiyah Tanjung Selor	70003888	Swasta	Tanjung Selor Hilir

*Sumber Data: Dapodik 2025*

Adapun penyaluran dana BOS pada sekolah tingkat SD/MI dalam tiga tahun terakhir (2024-2025) yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan seperti tertuang dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Penyaluran Dana BOS SMP Se Kabupaten Bulungan**

No	Jenis Data	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Jumlah Sekolah	63	64
2.	Jumlah Siswa	7.474	7580
3.	Jumlah Dana BOS	Rp. 9.865.680.000,-	Rp. 10.032.720.000,-

*Sumber: Dokumen Tim BOS DISDKIBUD Kab. Bulungan*

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 penerimaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 9.865.680.000,- dengan jumlah siswa penerima dana BOS sebanyak 7.474, untuk besaran 1 siswa terhitung Rp. 1.320.000,-/siswa/tahun, sedangkan pada tahun 2025 penerimaan dana BOS jenjang SMP sebesar Rp. 10.032.720.000,-/siswa/tahun dengan jumlah siswa penerima dana BOS sebanyak 7.460 siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar Rp. 1.320.000,-/siswa/tahun, dan terdapat 2 SMP kategori daerah khusus menerima dana BOS Rp. 185.520.000,- dengan nilai nominal 1 siswa Rp. 1.546.000,-/siswa/tahun sebanyak 120 siswa.

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengawasan pengelolaan dana BOS dilaksanakan oleh Tim BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten hingga Tim BOS Sekolah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa (2006) menyatakan bahwa kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawaban. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran. Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting. Kebijakan pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah diperuntukkan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs, dalam hal ini peneliti akan membatasi diri tidak meneliti Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah kepada SD/MI dan SMP/MTs tetapi hanya di SMP saja. Hal ini bermaksud agar pembahasan tidak terlalu lebar dan bias. Sebelum pemerintah memberikan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) sebagian besar Sekolah Menengah Pertama (SMP) cukup memperhatikan, karena sebagian besar dana diperoleh melalui sumbangan orang tua dalam bentuk SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan). Besaran SPP tiap siswa relatif kecil dan jauh dari cukup karena didasarkan atas kemampuan orang tua. Sekolah sulit berkembang dengan kondisi pendanaan yang masih kurang (Emma, 2025)

Adapun penyaluran dana BOS pada sekolah tingkat SMP/MTs dalam tiga tahun terakhir (2024-2025) yang diperoleh dari SMP yang berada di Tanjung Selor seperti tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Penyaluran dana BOS Jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor tahun 2024-2025

No	Jenis Data	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Jumlah Siswa	3003	2.895
2.	Jumlah Dana BOS	Rp. 3.963.960.000	Rp. 3.821.400.000

*Sumber: Dokumen Dana BOS Jenjang SMP di Tanjung Selor*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 jumlah penerimaan dana BOS jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor sebanyak Rp. 3.963.960.000,- dengan jumlah siswa penerima dana BOS sebanyak 3003 siswa, dengan ketentuan Rp. 1.320.000,-/siswa/tahun, sedangkan pada tahun 2025 penerimaan dana BOS jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor sebesar Rp. 3.821.400.000,-, dengan jumlah siswa penerima BOS sebanyak 2.895, penerimaan nominal 1 siswa sebesar Rp. 1.320.000,- per tahun.

Jumlah penyaluran dana BOS jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dikarenakan jumlah siswa yang semakin bertambah. Pembiayaan pendidikan jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai tetapi bagaimana biaya yang tersedia tersebut dialokasikan. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan. Kendala dalam pengelolaan biaya pendidikan jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor adalah sering terjadi keterlambatan dalam pertransferan dana BOS dari pusat sehingga menyebabkan pemaparan pelaporan dana BOS tidak efektif dan efisien. Kendala lain yang dialami sekolah-sekolah jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor juga memperlambat pelaporan penggunaan dana BOS. (Kepala Sekolah, Wawancara, 15 November 2025)

Seringnya terjadi keterlambatan transfer dana BOS di semester awal tahun, menyebabkan pemberian honorarium terhutang, meminimalis kebutuhan operasional sekolah, dan memperlambat kegiatan kesiswaan. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar: Rp 1.320.000/siswa/tahun untuk siswa SMP di tahun 2024 dan 2025. Dana BOS seharusnya diterima setiap semester (enam bulanan), yaitu Semester Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari, Semester Kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli (Kepala Sekolah, Wawancara, 15 November 2025)

Manajemen dana BOS di sekolah diharapkan dapat dicairkan dengan tepat waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan program, dapat dikelola secara profesional transparan dan akuntabel, memberikan layanan yang memadai kepada

siswa dan penggunaan model pengelolaan yang tepat serta adanya monitoring dan evaluasi yang efektif. Namun kenyataan yang ada dilapangan ternyata pencairan yang masih terlambat, anggaran disusun atas dasar ketersediaan dana, kurang profesional, transparan dan akuntabel, serta adanya monitoring dan evaluasi yang kurang efektif. Dengan demikian masih adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Kepala Sekolah, Wawancara, 15 November 2025)

Upaya pengelolaan pembiayaan pendidikan dana BOS Jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor dilakukan dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa kepala sekolah dan guru menyadari sepenuhnya bahwa biaya pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan kegiatan pembelajaran. Hampir semua kegiatan membutuhkan biaya sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan di Jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor tidak berdaya sama sekali. Biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pendidikan di Jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor memiliki cakupan yang luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang ataupun tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).

Realitanya masalah yang dihadapi oleh sekolah Jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS. Perencanaan pengelolaan dana BOS di Jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor yaitu tidak melibatkan Komite atau instansi yang terlibat dalam perencanaan BOS. Secara normatif, pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan menengah pertama seharusnya diawali dengan proses perencanaan yang partisipatif dan transparan. Perencanaan tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Namun dalam realitasnya, pada jenjang SMP di Kecamatan Tanjung Selor, proses perencanaan pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya melibatkan Komite Sekolah maupun instansi yang seharusnya berperan dalam perencanaan BOS. Penyusunan RKAS cenderung dilakukan secara internal oleh pihak sekolah, terutama oleh kepala sekolah dan bendahara, tanpa forum musyawarah yang memadai. Kondisi ini berdampak pada Minimnya aspirasi dan kebutuhan riil peserta didik dan masyarakat yang seharusnya diwakili oleh Komite Sekolah; Rendahnya transparansi dalam penentuan prioritas penggunaan dana BOS; Potensi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan operasional sekolah yang sebenarnya.

Kelemahan dalam tahap perencanaan berdampak langsung pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS. Ketika RKAS disusun tanpa melibatkan pihak terkait, maka pelaksanaan penggunaan Dana BOS seringkali Tidak sepenuhnya mengacu pada kebutuhan prioritas sekolah; Mengalami perubahan anggaran secara internal tanpa mekanisme revisi yang transparan; Kurang mendapatkan pengawasan sosial dari Komite Sekolah. Akibatnya, penggunaan Dana BOS cenderung bersifat administratif dan rutinitas, bukan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah.

Pada tahap evaluasi, keterbatasan pelibatan Komite Sekolah juga berdampak pada lemahnya proses penilaian terhadap pengelolaan Dana BOS. Evaluasi

penggunaan dana sering kali hanya bersifat formalitas pelaporan, seperti penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, tanpa evaluasi substansi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Kondisi ini menyebabkan Evaluasi tidak menghasilkan rekomendasi perbaikan yang komprehensif; Pengawasan eksternal dan internal terhadap Dana BOS tidak berjalan optimal; Kesalahan perencanaan dan pelaksanaan cenderung berulang pada periode berikutnya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen sekolah dan pengawasan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di satu sisi, sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya dan menjalankan berbagai kebijakan pendidikan. Di sisi lain, pengawasan tetap diperlukan sebagai mekanisme pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan. Ketegangan antara tuntutan otonomi pengelolaan dan kebutuhan akan kontrol inilah yang sering memunculkan perdebatan.

Selain permasalahan manajemen sekolah, aspek pengawasan pendidikan juga sering menjadi isu yang mendapat perhatian dalam kajian empiris. Beberapa studi telah menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan di sekolah menghadapi berbagai permasalahan operasional. Misalnya, proses supervisi pendidikan yang dilaksanakan oleh pengawas atau kepala sekolah sering kali belum optimal karena keterbatasan waktu, sumber daya, serta kurangnya partisipasi aktif dari pihak-pihak yang dikontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala seperti minimnya sumber daya untuk pengawasan dan kurangnya fokus dalam supervisi akademik maupun manajerial dapat menghambat efektivitas pengawasan di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian Suryanto (2021) dengan judul “Pengaruh Manajemen Sekolah terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Pendidikan”, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan fungsi manajemen sekolah yang belum optimal, khususnya pada aspek perencanaan dan pengendalian, berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya keterlibatan pemangku kepentingan serta kurangnya koordinasi internal sekolah menjadi faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan dana. Temuan tersebut memperkuat permasalahan terkait manajemen sekolah yang belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2023) dengan judul “Hubungan Manajemen Sekolah dan Pengawasan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS” menunjukkan bahwa manajemen sekolah dan pengawasan memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan efektivitas penyaluran dan penggunaan Dana BOS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketika manajemen sekolah tidak didukung oleh pengawasan yang memadai, maka potensi ketidaktepatan dalam pengelolaan dana semakin besar. Temuan ini secara empiris memperlihatkan bahwa permasalahan manajemen sekolah dan pengawasan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan manajemen sekolah dan pengawasan bukan sekadar isu konseptual, tetapi telah terbukti secara empiris masih menjadi tantangan dalam praktik pengelolaan dana pendidikan. Oleh karena itu, kedua permasalahan tersebut

menjadi isu yang penting dan relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini berangkat dari pentingnya tata kelola sekolah yang efektif dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, penyaluran dan pengelolaan Dana BOS menuntut adanya manajemen sekolah yang baik serta pengawasan yang berjalan secara optimal.

Dalam praktiknya, manajemen sekolah memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan Dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah beserta tim manajemen sekolah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi manajemen sekolah belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama pada aspek perencanaan dan pengendalian, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran Dana BOS.

Selain manajemen sekolah, pengawasan juga menjadi faktor penting dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal sekolah, seperti kepala sekolah dan komite sekolah, serta oleh pihak eksternal, seperti pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan di lapangan sering kali masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi intensitas, pendekatan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara manajemen sekolah dan pengawasan dalam menentukan kualitas penyaluran Dana BOS. Manajemen sekolah yang tidak didukung oleh pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran dana, sementara pengawasan yang kuat tanpa didukung manajemen yang baik juga tidak akan menghasilkan pengelolaan yang efektif. Oleh karena itu, kedua aspek ini perlu dikaji secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaruhnya terhadap penyaluran Dana BOS.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Manajemen**

Secara umum, para pakar melihat manajemen sebagai suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Sebagian ahli menekankan bahwa manajemen merupakan upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, baik manusia maupun non-manusia. Dalam pandangan ini, manajemen dipahami sebagai aktivitas yang menuntut kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai potensi agar dapat bekerja secara optimal. Perspektif ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung unsur keterampilan dan seni dalam mengelola orang lain (Kelana & Fahlevvi, 2024). George R. Terry dalam Syahputra & Aslami (2023) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian),

*Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Teori fungsi manajemen merupakan salah satu teori dasar dalam ilmu manajemen yang menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan manajerial yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Pengawasan**

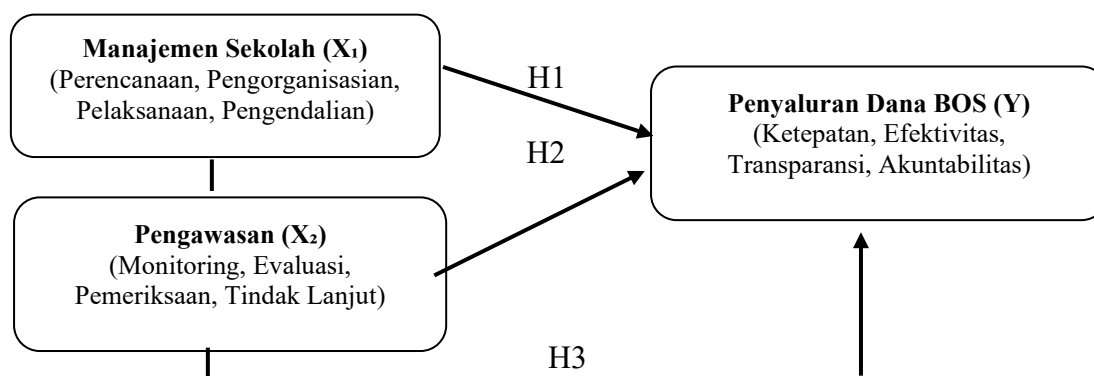
Handoko dalam Anis (2021) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses penentuan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kerja, perbandingan antara pelaksanaan dengan standar, serta pengambilan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Handoko dalam Anis (2021), pengawasan bertujuan untuk Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, Menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, Memberikan dasar bagi pengambilan tindakan korektif dan perbaikan. Agar pengawasan berjalan efektif, Handoko dalam Anis (2021), mengemukakan beberapa prinsip pengawasan, antara lain Objektivitas, Ketepatan waktu, Fleksibilitas, Keterpaduan dengan perencanaan, Berorientasi pada tindakan perbaikan.

### **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS diberikan kepada sekolah sebagai bentuk intervensi negara dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu dan merata. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dana BOS adalah program pemerintah pusat yang menyediakan pendanaan bagi sekolah untuk menutup sebagian besar biaya operasional sekolah, sehingga peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa terbebani biaya yang berlebihan. Pengelolaan Dana BOS didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yaitu Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi indikator normatif dalam menilai kualitas pengelolaan dan penyaluran Dana BOS.

### **Kerangka Konseptual**

Secara konseptual, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel berdasarkan data numerik yang dapat diukur secara objektif. Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada tahun 2026, yang meliputi beberapa tahapan kegiatan penelitian. Tahapan tersebut mencakup penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 31 responden yang terdiri dari unsur sekolah, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Inspektorat. Seluruh populasi tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana manajemen sekolah dan pengawasan memberikan pengaruh terhadap penyaluran Dana BOS. Sebelum dilakukan analisis regresi, data akan melalui tahapan pengujian kualitas instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, serta pengujian asumsi klasik sebagai prasyarat analisis regresi (Sugiyono, 2008).

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen yang digunakan terdiri dari manajemen sekolah ( $X_1$ ) dan pengawasan ( $X_2$ ), sedangkan variabel dependen adalah penyaluran Dana BOS ( $Y$ ). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Analisis ini bertujuan untuk menguji sejauh mana perubahan pada variabel manajemen sekolah dan pengawasan dapat memengaruhi penyaluran Dana BOS di sekolah.

Model regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penyaluran Dana BOS

a = Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Manajemen Sekolah

$X_2$  = Pengawasan

E = *Error term*

Melalui analisis regresi ini, akan diperoleh informasi mengenai arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, pengujian juga dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial melalui uji t dan secara simultan melalui uji F. Hasil analisis regresi selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Regresi

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.474	10.546		2.985	.006
	Manajemen Sekolah	-.042	.122	-.064	-.340	.736
	Pengawasan	.211	.192	.206	1.095	.283

a. Dependent Variable: Penyaluran Dana BOS

*Sumber : Hasil perhitungan dengan software statistik*

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 31,474 - 0,042.X_1 + 0,211.X_2$$

1. Konstanta (a = 31,474)

Nilai konstanta sebesar 31,474 menunjukkan bahwa apabila variabel manajemen sekolah ( $X_1$ ) dan pengawasan ( $X_2$ ) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai penyaluran Dana BOS (Y) berada pada angka 31,474. Nilai ini menggambarkan tingkat dasar penyaluran dana tanpa dipengaruhi oleh kedua variabel independen.

2. Koefisien Manajemen Sekolah ( $b_1 = -0,042$ )

Koefisien regresi pada variabel manajemen sekolah bernilai negatif sebesar -0,042. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada manajemen sekolah justru diikuti dengan penurunan penyaluran Dana BOS sebesar 0,042 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun demikian, nilai t hitung = -0,340 dengan signifikansi sebesar 0,736 ( $> 0,05$ ) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, secara parsial variabel manajemen sekolah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap penyaluran Dana BOS.

3. Koefisien Pengawasan ( $b_2 = 0,211$ )

Koefisien regresi pada variabel pengawasan bernilai positif sebesar 0,211. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pengawasan akan meningkatkan penyaluran Dana BOS sebesar 0,211 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun demikian, nilai t hitung = 1,095 dengan signifikansi sebesar 0,283 ( $> 0,05$ ) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, secara parsial variabel pengawasan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS.

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Variabel manajemen sekolah ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Variabel pengawasan ( $X_2$ ) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara deskriptif manajemen sekolah dan pengawasan berada dalam kategori baik, namun dalam model statistik keduanya belum mampu menjelaskan variasi dalam penyaluran Dana BOS secara signifikan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Manajemen sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap

penyaluran Dana BOS. Meskipun demikian, arah hubungan menunjukkan bahwa pengawasan memiliki kecenderungan hubungan positif, sedangkan manajemen sekolah menunjukkan arah hubungan negatif, meskipun keduanya tidak signifikan secara statistik.

**Tabel 6. Hasil Perhitungan untuk Koefisien Determinasi****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.204 <sup>a</sup>	.042	-.027	3.22070

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Manajemen Sekolah

*Sumber : Hasil perhitungan dengan software statistik*

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai R sebesar 0,204, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel manajemen sekolah ( $X_1$ ) dan pengawasan ( $X_2$ ) dengan penyaluran Dana BOS ( $Y$ ) berada pada kategori lemah. Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar -0,027 mengindikasikan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan jumlah sampel, model regresi yang digunakan tidak memiliki kemampuan prediktif yang baik. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa model yang dibangun bahkan lebih lemah dibandingkan dengan model tanpa variabel independen. Selain itu, nilai Standard Error of the Estimate sebesar 3,22070 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model terhadap variabel penyaluran Dana BOS. Semakin kecil nilai ini, maka model semakin baik dalam memprediksi variabel dependen, namun dalam penelitian ini nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variasi yang cukup besar yang belum mampu dijelaskan oleh model.

Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya pada uji parsial (uji t), dimana baik variabel manajemen sekolah maupun pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Berdasarkan nilai koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen sekolah ( $X_1$ ) dan pengawasan ( $X_2$ ) secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 4,2% variasi penyaluran Dana BOS, sedangkan sisanya sebesar 95,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

**Tabel 6. Hasil Perhitungan untuk Uji F****ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.656	2	6.328	.610	.550 <sup>b</sup>
	Residual	290.441	28	10.373		
	Total	303.097	30			

a. Dependent Variable: Penyaluran Dana BOS

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Manajemen Sekolah

*Sumber : Hasil perhitungan dengan software statistik*

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda melalui SPSS, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,610 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,550. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), maka nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,550 > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel manajemen sekolah ( $X_1$ ) dan pengawasan ( $X_2$ ) tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel penyaluran Dana BOS (Y).

Hasil uji F ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun belum mampu untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, secara bersama-sama kedua variabel independen belum mampu menjelaskan variasi penyaluran Dana BOS secara signifikan. Temuan ini konsisten dengan hasil uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ), yang menunjukkan bahwa Tidak terdapat pengaruh signifikan baik secara individu maupun bersama-sama, Kontribusi variabel sangat kecil ( $R^2$  hanya 4,2%), Model tidak cukup kuat untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), dapat disimpulkan bahwa Manajemen sekolah ( $X_1$ ) dan pengawasan ( $X_2$ ) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS (Y).

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Manajemen Sekolah terhadap Penyaluran Dana BOS**

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,042 dengan nilai signifikansi 0,736 ( $> 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Bahkan, arah hubungan yang terbentuk bersifat negatif, meskipun secara statistic belum signifikan. Secara teoritis, manajemen sekolah yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seharusnya mampu mendukung efektivitas pengelolaan dana, termasuk dalam aspek penyaluran. Dalam perspektif George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, manajemen sekolah sebenarnya lebih dekat dengan aspek disposisi (sikap pelaksana) dan kapasitas internal organisasi.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran Dana BOS. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penyaluran Dana BOS merupakan kebijakan yang bersifat top-down, dimana mekanisme distribusi dana ditentukan oleh pemerintah pusat melalui sistem yang telah terstandarisasi. Dengan demikian, ruang intervensi manajemen sekolah terhadap proses penyaluran menjadi sangat terbatas.

Secara empiris, temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan internal sekolah lebih berpengaruh pada tahap penggunaan dana dibandingkan tahap penyaluran. Misalnya, penelitian yang dapat ditelusuri melalui Google Scholar dengan kata kunci "*manajemen sekolah dan BOS pengaruh*" menunjukkan bahwa variabel manajemen lebih dominan pada aspek akuntabilitas penggunaan dana. Satu diantaranya yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Salindeho dkk. (2021) terkait "Analisis Relevansi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kabupaten Halmahera Utara" yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana BOS di sekolah lebih berorientasi pada aspek penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana dibandingkan mekanisme penyaluran dana itu sendiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi manajemen sekolah cenderung berperan pada tahap pengelolaan internal dana setelah diterima oleh sekolah.

Dari sisi fakta lapangan, kondisi ini juga terlihat pada sekolah-sekolah responden, dimana proses penyaluran Dana BOS tidak ditentukan oleh pihak

sekolah, melainkan mengikuti jadwal dan mekanisme dari pemerintah. Sekolah hanya berperan sebagai penerima dan pengelola dana setelah dana tersebut disalurkan.

## **2. Pengaruh Pengawasan terhadap Penyaluran Dana BOS**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengawasan memiliki koefisien regresi sebesar 0,211 dengan nilai signifikansi 0,283 ( $> 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS, meskipun memiliki arah hubungan positif. Secara teoritis, pengawasan merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam model George C. Edward III, pengawasan berkaitan dengan struktur birokrasi dan mekanisme kontrol, yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam penelitian ini, pengawasan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Hal ini dapat dipahami karena pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, komite, maupun dinas pendidikan lebih berfokus pada penggunaan dan pertanggungjawaban dana, bukan pada proses penyaluran dana itu sendiri.

Kajian empiris mendukung hasil penelitian ini bahwa pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Penelitian Innanawati dkk. (2023) menunjukkan bahwa pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS, terutama pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dana sekolah. Selain itu, penelitian Simanjuntak dkk. (2024) juga menegaskan bahwa pengawasan dan keterbukaan informasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di lingkungan sekolah. Namun demikian, pengawasan tersebut lebih dominan pada tahap penggunaan dan pertanggungjawaban dana dibandingkan pada proses penyaluran dana itu sendiri.

Dari fakta lapangan, pengawasan yang dilakukan di sekolah cenderung bersifat administratif, seperti pemeriksaan laporan, monitoring penggunaan dana, dan evaluasi program. Sementara itu, proses penyaluran dana sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah, sehingga pengawasan internal maupun eksternal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel tersebut.

## **3. Pengaruh Manajemen Sekolah dan Pengawasan terhadap Penyaluran Dana BOS (Simultan)**

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,550 ( $> 0,05$ ), yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel manajemen sekolah dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Dana BOS. Hal ini diperkuat oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,042, yang menunjukkan bahwa kedua variabel hanya mampu menjelaskan 4,2% variasi penyaluran Dana BOS, sedangkan sisanya sebesar 95,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam perspektif teori George C. Edward III, hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tidak hanya berasal dari tingkat pelaksana (sekolah), tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor eksternal, seperti: sistem komunikasi kebijakan dari pusat, ketersediaan sumber daya (anggaran dan sistem), struktur birokrasi penyaluran dana. Dengan demikian, penyaluran Dana BOS lebih dipengaruhi oleh mekanisme struktural dan kebijakan pemerintah dibandingkan faktor internal sekolah.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran Dana BOS sangat dipengaruhi oleh sistem distribusi pemerintah dan regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran dana. Penelitian Andre Prasetyo Widodo (2020) dalam artikel *Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Dana BOS berkaitan erat dengan mekanisme penyaluran yang diatur dalam kebijakan pemerintah dan Undang-Undang APBN.

Selain itu, penelitian Tinggogoy (2019) menunjukkan bahwa permasalahan penyaluran Dana BOS lebih banyak dipengaruhi oleh keterlambatan pencairan dan implementasi kebijakan pemerintah dibandingkan faktor internal sekolah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa proses penyaluran Dana BOS mengikuti regulasi pemerintah, sehingga sekolah memiliki keterbatasan dalam memengaruhi mekanisme distribusi dana.

Fakta lapangan juga memperkuat temuan ini, dimana sekolah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan waktu, jumlah, maupun mekanisme penyaluran Dana BOS. Seluruh proses tersebut telah diatur secara terpusat, sehingga variabel internal sekolah tidak memiliki kontribusi yang signifikan dalam model penelitian ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel internal sekolah (manajemen dan pengawasan) tidak berpengaruh signifikan, Penyaluran Dana BOS lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal (kebijakan dan sistem pemerintah), Terdapat ketidaksesuaian antara variabel penelitian dengan karakteristik variabel dependen.

Temuan ini bukan merupakan kelemahan penelitian, melainkan memberikan kontribusi penting bahwa dalam konteks kebijakan publik, khususnya Dana BOS, perlu dibedakan antara penyaluran dana (distribution) lebih ditentukan oleh pemerintah, dan pengelolaan dana (management) lebih ditentukan oleh sekolah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Dana BOS, khususnya pada aspek penyaluran, lebih ditentukan oleh faktor struktural dan sistem kebijakan dibandingkan dengan faktor manajerial di tingkat sekolah. Hal ini memberikan implikasi bahwa penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel eksternal agar mampu menjelaskan fenomena penyaluran dana secara lebih komprehensif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen sekolah tidak memberikan pengaruh terhadap penyaluran Dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen yang dilakukan di tingkat sekolah belum memiliki keterkaitan langsung dengan proses penyaluran dana, karena mekanisme penyaluran Dana BOS lebih ditentukan oleh sistem, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pengawasan tidak memberikan pengaruh terhadap penyaluran Dana BOS. Pengawasan yang dilakukan di lingkungan sekolah lebih berorientasi pada penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana, sehingga belum berkaitan secara langsung dengan proses penyaluran Dana BOS kepada sekolah.
3. Manajemen sekolah dan pengawasan secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap penyaluran Dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa

efektivitas penyaluran Dana BOS lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah, mekanisme birokrasi, sistem penyaluran dana, serta ketentuan administrasi yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2025). Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Mi Miftahussalam 1 Wonosalam. *Rihlah Review: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(02), 29-40. Retrieved from <https://journal.faibillfath.ac.id/index.php/Rihlah/article/view/1064>
- Anis, M. (2021). Pengaruh pengawasan terhadap kinerja Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.
- Emma, E. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTS DDI Ujung Kec. Lanrisang. *Thesis*. IAIN Parepare. Retrieved from <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11848/>
- Fauzi, A. (2020). Analisis Biaya Mutu Dalam Meningkatkan Daya Saing Pendidikan. *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jumpa>
- Handayani, T. (2025). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dalam Pengelolaan Keuangan Mtsn 7 Kediri. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta)*, 17-28. Retrieved from <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakaaktiva/article/view/1435>
- Hidayat, R., Alam, M., Halim, A. S., & Agustian, S. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pasca Covid-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 228-241. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2180>
- Innanawati., Dewi., M. W., & Pratiwi, D. N. (2024). Pengaruh akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan BOS. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1).
- Julianda, A., Siagian, A. A., Yolandari., & Fauz, R. A. (2025). Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara Dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 15-31.
- Pangadilang, N., Pangemanan, S. E., & Pangemanan, F. N. (2023). Kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP N 1 Essang Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *GOVERNANCE*, 3(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/45929>
- Salindeho, W., Sondakh, J. J., & Manossoh, H. (2021). Analisis relevansi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 134-143.
- Sidabutar et al., *Management of Education Funding in Improving the Quality of Education at Junior High School*, *BIRCI Journal*, 2024.
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju pendidikan

berintegritas: Studi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4).  
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1588>

- Sugiyono. (2008). *Statistika Untuk Penelitian* (Ketigabelah). Bandung: CV Alfabeta.
- Syahrudin, S., & Ibrahim, M. (2017). Aplikasi Sistem Informasi Desa Sebagai Teknologi Tepat Guna Untuk Pendataan Penduduk Dan Potensi Desa. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 1(1), 60.  
<https://doi.org/10.31764/jmm.v1i1.14>
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51-61.
- Tinggogoy, D. C. (2019). Analisis dampak implementasi kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah: Studi di SMA Negeri 1 Halmahera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 7(1).  
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.37>
- Widodo, A. P. (2020). Implementasi kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2). <https://doi.org/10.21831/socia.v17i2.32478>